

**IMPLEMENTASI PROGRAM BERSAMA LINDUNGI ANAK (BERLIAN)  
DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN  
SIDOARJO**

**Firda Anggraeni**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[firdaanggra@gmail.com](mailto:firdaanggra@gmail.com)

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

**Ghulam Maulana Ilman**

Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[ghulamilman@untag-sby.ac.id](mailto:ghulamilman@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study discusses the importance of implementation of the *Bersama Lindungi Anak* (BERLIAN) Program conducted by the Office of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of Sidoarjo Regency. This research employs the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which emphasizes that the success of policy implementation is influenced by six main variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, disposition of implementers, inter-organizational communication, and the socio-economic and political environment. Data collection was carried out through interviews, observations, and document analysis, with data sources including the DP3AKB of Sidoarjo Regency, the UPTD for Women and Children Protection (PPA), the Women and Children Service Unit (Unit PPA), and the Principal of MTs Darussalam Pejangkungan Prambon as a representative of a recipient school. The findings indicate that the implementation of the BERLIAN Program has generally proceeded well based on the variables outlined in Van Meter and Van Horn's framework, supported by active community and school involvement, effective cross-sector coordination, and responsive implementers. However, challenges remain, particularly in the form of limited funding due to political dynamics and a lack of responsiveness to schools requesting follow-up outreach. These findings suggest that strengthening external environmental factors and implementers' disposition is necessary to improve the effectiveness of the program's implementation in the future.

**Keywords:** *Policy Implementation, Child Protection, Local Government*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana implementasi program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) yang di jalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn, yang menekankan bahwa hasil implementasi kebijakan dipengaruhi oleh eman variabel utama yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obeservasi, dan telaah dokumen, dengan sumber data yang mencakup Sumber data penelitian mencakup DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, UPTD PPA, Unit PPA, serta Kepala Sekolah MTs Darussalam Pejangkungan Prambon sebagai representasi sekolah penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BERLIAN telah berjalan cukup baik berdasarkan variabel teori Van Meter dan Van Horn, dengan dukungan aktif dari masyarakat dan sekolah, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta sikap pelaksana yang responsif. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran akibat dinamika politik, serta kurangnya respons terhadap permintaan penyuluhan lanjutan dari sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan pada aspek lingkungan eksternal dan disposisi pelaksana diperlukan guna meningkatkan efektivitas implementasi program ke depan.

**Kata Kunci:** *Implemantasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah*

#### **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah global yang amat serius dan terus menjadi perhatian utama berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Bentuk kekerasan ini dapat berwujud kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang semuanya berdampak negatif terhadap kesehatan mental, emosional, dan fisik anak. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Barker, 1978 dalam Abdul Kadir et al., 2020) yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan penghinaan atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Menurut data UNICEF, Sekitar 62% anak perempuan dan laki-laki berusia 13-17 tahun diketahui pernah mengalami paling tidak satu bentuk kekerasan sepanjang hidup mereka. Di Indonesia sendiri, angka kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan kasus-kasus kekerasan yang sering melibatkan orang tua, pengasuh, guru, hingga orang lain yang dekat dengan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Walker, et al., 1997 dalam Alit Kurniasari et al., 2017) yang menyatakan bahwa Survei Kesehatan Berbasis Sekolah Global pada tahun 2007 di Indonesia menunjukkan bahwa 49,7% dari remaja di 50 sekolah yang dijadikan percontohan mengalami *bullying* sehari atau lebih selama 30 hari sebelum survei dilakukan.

Lebih dari setengah jumlah siswa laki-laki (55,0%) dan hampir setengah dari jumlah siswa perempuan (44,7%) melaporkan mengalami *bullying* sehari atau lebih.

Di Indonesia, kebijakan perlindungan anak telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 Ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa, "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya." Namun, meskipun regulasi ini telah disusun dengan baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak, terutama di daerah terpencil. Diasamping itu, banyak pula masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya dampak buruk kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum juga seringkali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. (Dwi Putri Melati, 2015)

Kekerasan fisik terhadap anak perempuan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data, pada tahun 2021 tercatat sekitar 10,49 persen anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan fisik sepanjang hidup mereka. Persentase tersebut meningkat menjadi 15,56 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan lonjakan signifikan dalam kurun waktu tiga tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya perlindungan terhadap anak perempuan masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih serius dari berbagai pihak. Anak perempuan, yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, masih menghadapi risiko tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. (SNPHAR 2024) Peningkatan angka kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak yang saat ini berlaku di Indonesia. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan kompleks dalam mengatasi berbagai faktor pemicu kekerasan. Tekanan ekonomi yang menimbulkan stres dalam keluarga, rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif kekerasan, serta masih kuatnya budaya yang menganggap kekerasan sebagai bentuk disiplin merupakan beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan sistematis dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga perlu bekerja sama secara sinergis guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Program BERLIAN yang merupakan singkatan dari "Bersama Lindungi Anak," merupakan sebuah inisiatif strategis yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun

2014 dan telah aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi selama kurun waktu 11 tahun berturut-turut. Sebagai bentuk keberlanjutan upaya tersebut, pada tanggal 8 hingga 22 Februari 2022, DP3AKB kembali menggerakkan kegiatan penyuluhan secara langsung di sejumlah satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) guna meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu perlindungan anak. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penyuluhan adalah SMP Muhammadiyah 4 Porong, yang menerima kunjungan tim sosialisasi pada hari Kamis, 10 Februari 2022.

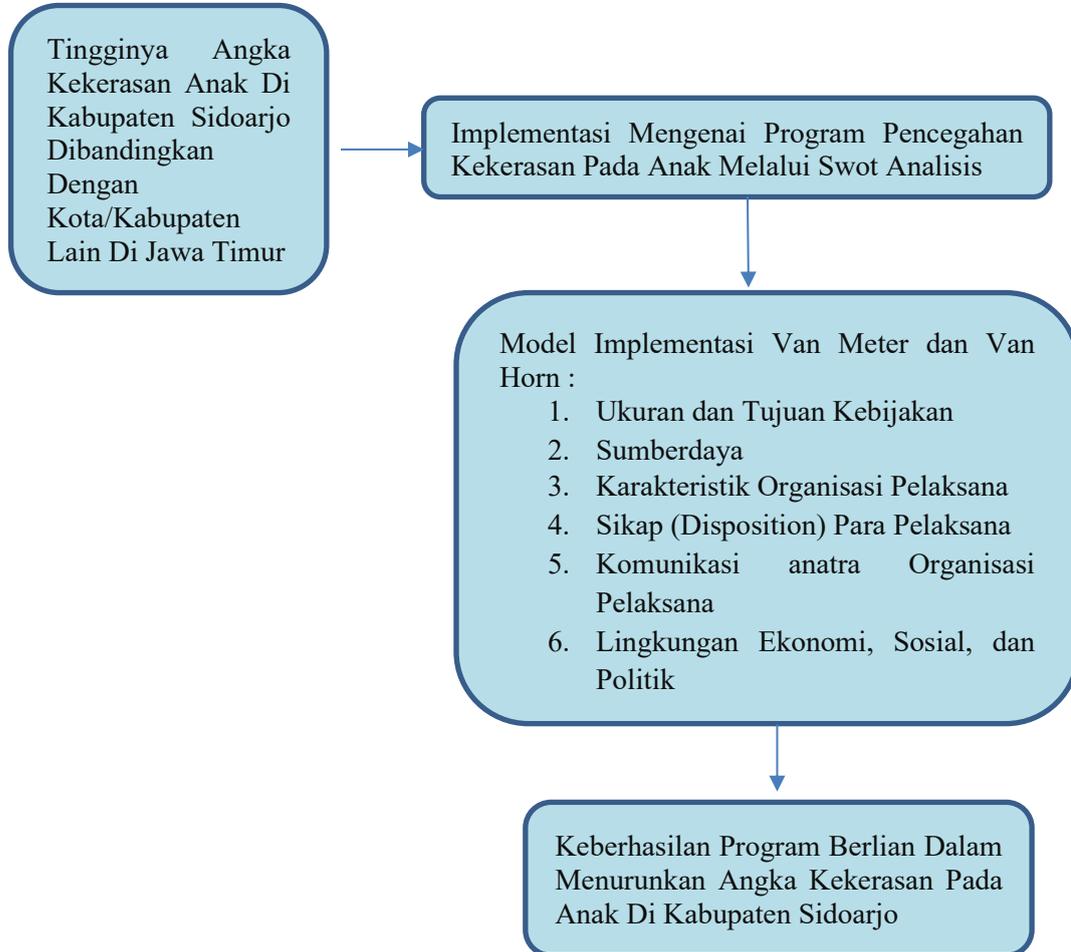
Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, DP3AKB Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan narasumber dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Reserse Kriminal PPA Polresta Sidoarjo, serta Dinas Kominfo. Materi yang disampaikan mencakup dua aspek utama, yaitu penanganan kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak, serta penggunaan internet sehat dan dampaknya. Pada aspek pertama, narasumber memberikan pemahaman kepada siswa dan guru tentang peran UPTD PPA dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan serta perundungan di lingkungan pendidikan. Sedangkan pada aspek kedua, siswa dibekali pengetahuan mengenai pentingnya bijak dalam menggunakan internet, termasuk penghindaran dari potensi bahaya konten negatif.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama yang saling berkaitan. Pertama, standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan konsisten. Kejelasan ini penting agar para pelaksana kebijakan dapat memahami dengan tepat apa yang menjadi sasaran dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, **sumber daya** menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, baik berupa sumber daya manusia seperti jumlah dan kualitas pelaksana, maupun sumber daya non-manusia seperti anggaran, informasi, sarana, dan prasarana yang memadai. Ketiga, karakteristik agen pelaksana juga berperan besar, mencakup struktur organisasi, kompetensi, kapasitas kelembagaan, serta kepemimpinan yang menentukan efektivitas dalam mengelola pelaksanaan kebijakan. Keempat, komunikasi antar organisasi pelaksana harus berjalan dengan baik agar setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan yang diimplementasikan, serta untuk memastikan adanya koordinasi dan mekanisme pengawasan yang efektif. Kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan tempat kebijakan dijalankan turut mempengaruhi hasil implementasi. Lingkungan yang stabil dan mendukung akan memperlancar proses pelaksanaan, sedangkan kondisi yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan. Terakhir, disposisi atau sikap pelaksana, seperti komitmen, motivasi, dan pemahaman terhadap kebijakan, sangat menentukan dalam proses implementasi. Jika pelaksana bersikap positif dan mendukung, maka kebijakan cenderung dapat

dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuannya.

### Kerangka Konseptual



## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata, gambar, atau observasi yang dianalisis untuk menangkap makna, pola, dan wawasan yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif subjek secara holistik, sehingga mampu memahami konteks serta dinamika yang mungkin tidak terlihat dalam data numerik.

### 2. Objek dan lokasi penelitian

#### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan informasi yang lebih rinci dan komprehensif serta memudahkan proses observasi. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang berada pada Jl. Pahlawan IX No.173 B, Kwadengan

Barat, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 hingga bulan Desember 2024.

## 2) **Objek Penelitian**

Maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu untuk menganalisis implementasi *Program Bersama Lindungi Anak* dalam pencegahan kekerasan anak yang diinisiasi oleh DP3AK Kabupaten Sidoarjo.

### **Jenis Data dan Sumber data**

Data adalah hal yang belum diproses yang harus diubah menjadi informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menyajikan fakta. Kata-kata merupakan sumber utama data dalam penelitian kualitatif; data tambahan, termasuk dokumen, dan sumber lain, melengkapi tindakan yang tersisa. Peneliti menggunakan jenis sumber data berikut dalam penelitian ini:

#### **Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek penelitian melalui proses interaksi langsung, seperti wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner. Data primer bersifat orisinal dan belum diolah oleh pihak lain, sehingga memiliki tingkat keotentikan yang tinggi dan sangat penting dalam penelitian lapangan. Yaitu dengan Wawancara dan Observasi bersama narasumber dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, UPTD PPA, Unit PPA Polresta Sidoarjo, dan Sekolah Penerima Program.

#### **Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau catatan yang telah tersedia sebelumnya, seperti laporan resmi, arsip, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan literatur lainnya. Meskipun data sekunder tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, keberadaannya tetap penting untuk mendukung, membandingkan, atau memperkuat temuan dari data primer.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo merupakan upaya strategis yang kompleks dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Program ini dilandasi oleh komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan program BERLIAN melibatkan berbagai pihak dan memerlukan sinergi lintas sektor, mulai dari instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Dalam implementasinya, pendekatan teori Van Meter dan Van Horn menjadi relevan untuk menganalisis efektivitas program ini. Teori ini menekankan pentingnya sejumlah variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan, seperti kejelasan standar dan tujuan program, ketersediaan sumber daya, kualitas komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pelaksanaan.

### ***Ukuran Dan Tujuan Kebijakan (Standar Dan Sasaran Kebijakan)***

Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), dalam indikator Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, telah memenuhi indikator standar dan tujuan kebijakan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah anak di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan pandangan Van Metter dan Van Horn (1975), semakin terdefinisi ukuran dan tujuan kebijakan, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasinya. Temuan lapangan yang menunjukkan kesesuaian antara tujuan program BERLIAN dan realisasi di tingkat pelaksana menjadi bukti bahwa indikator ini berkontribusi secara positif terhadap efektivitas kebijakan.

#### ***Sumber Daya***

Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), indikator sumber daya, sudah dapat dikatakan telah terpenuhi secara substansial dalam implementasi. Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari aspek SDM dan pendanaan. Meski dukungan sarana prasarana belum sepenuhnya difasilitasi oleh pelaksana, sinergi dengan pihak sekolah dapat menutupi keterbatasan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran implementasi program perlindungan anak di daerah

#### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar organisasi pelaksana Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan secara optimal terlihat dari komitmen dalam menjaga komunikasi lintas sektor. koordinasi yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan bukti bahwa karakteristik organisasi pelaksana, sebagaimana dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn, telah terbentuk dengan baik dan menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan program perlindungan anak di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi prasyarat dalam teori Van Meter dan Van Horn, sehingga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi program perlindungan anak di tingkat daerah.

#### **Sikap Atau Disposisi Pelaksana**

Berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), indikator sikap dan disposisi, Sikap para pelaksana program menunjukkan kesesuaian antara pemahaman terhadap tujuan program dan komitmen dalam menjalankannya. DP3AKB secara rutin mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi, yang mencerminkan komitmen tinggi dan partisipasi aktif lintas sektor. Setiap pelaksana, baik dari instansi maupun sekolah, memahami tugasnya dan menjalankan peran secara optimal. Selain itu, interaksi mereka dengan siswa juga bersifat ramah dan mendukung, menciptakan suasana yang nyaman selama kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan disposisi pelaksana yang positif telah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo.

### **Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana**

Berdasarkan analisis teori Van Meter dan Van Horn (1975) pada indikator komunikasi antar organisasi pelaksana, implementasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan praktik komunikasi yang relatif efektif. Hal ini ditunjukkan melalui adanya koordinasi yang terstruktur antara DP3AKB dan instansi terkait, yang dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan, serta adanya fleksibilitas untuk melakukan rapat sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Pola komunikasi ini mencerminkan adanya penyampaian informasi dan instruksi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Namun demikian, adanya keterbatasan dalam jangkauan pelaksanaan program, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah MTs Darussalam, menunjukkan bahwa aspek komunikasi belum sepenuhnya menjangkau level teknis di sekolah, khususnya dalam perencanaan jumlah peserta dan distribusi informasi program. Hal ini menandakan bahwa komunikasi vertikal antara perumus kebijakan dan pelaksana teknis di lapangan masih perlu diperkuat agar keselarasan pelaksanaan dapat tercapai secara optimal.

### **Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik**

Dengan demikian, berdasarkan analisis teori Van Meter Van Horn (1973) dalam indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik pelaksanaan Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di Kabupaten Sidoarjo. Lingkungan sosial memberikan kontribusi yang sangat positif dan mendukung implementasi program. Terutama orang tua siswa dan pihak sekolah, yang memberikan dukungan aktif terhadap program. Dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah tercermin melalui penganggaran dan regulasi yang mendukung program. Namun, perbedaan prioritas antar pemangku kebijakan masih menjadi tantangan yang dapat mengganggu konsistensi pelaksanaan, terutama dalam hal pendanaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa stabilitas dukungan politik berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data temuan peneliti di lapangan yang didapatkan penulis dari data primer maupun sekunder, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dalam pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo ini sudah berjalan dengan cukup baik. Program tersebut memberikan dampak yang sangat positif ditandai dengan meningkatnya kesadaran siswa mengenai isu kekerasan, perundungan, dan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Kesadaran tersebut tercermin dari sikap siswa yang lebih terbuka dan peduli, terlihat saat sesi tanya jawab berlangsung, dimana para siswa secara aktif mengajukan pertanyaan, menunjukkan antusiasme, serta ketertarikan mereka terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, turut memperkuat penerimaan program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) di lingkungan pendidikan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan implementasi program, beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain terletak pada aspek kebijakan politik yang mempengaruhi alokasi anggaran,

sehingga berdampak pada keterbatasan jangkauan peserta dan frekuensi pelaksanaan di sekolah-sekolah. Selain itu, terdapat keterbatasan respon dari DP3AKB terhadap permintaan sekolah untuk mengadakan penyuluhan kembali di sekolah tersebut, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme respon dan pemetaan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun implementasi program telah menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaannya, dukungan politik yang konsisten dan peningkatan responsivitas pelaksana menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan dan perluasan dampak program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) ke depannya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil temuan yang telah di analisis dalam pembahasan dan kesimpulan diatas, peneliti merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai acuan dan bahan pembanding guna mendukung optimalisasi pelaksanaan program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dalam pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Rekomendasi ini disusun sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.  
Disarankan agar dukungan politik terhadap pelaksanaan program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) dalam pencegahan kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo diperkuat, khususnya dalam hal konsistensi penganggaran. Dinamika politik dan perbedaan prioritas kebijakan hendaknya tidak menjadi hambatan terhadap kesinambungan pendanaan program yang bersifat preventif dan memiliki nilai strategis dalam perlindungan anak.
2. Kepada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo  
Disarankan agar DP3AKB meningkatkan responsivitas terhadap permintaan dari satuan pendidikan yang mengajukan permohonan penyuluhan ulang atau lanjutan. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Diperlukan sistem pemetaan kebutuhan berbasis permintaan sekolah yang aktif, dengan mekanisme penjadwalan ulang yang fleksibel dan adaptif. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan rotasi sekolah agar tidak menghambat kesinambungan edukasi pada lembaga pendidikan yang menunjukkan komitmen dan antusiasme tinggi terhadap program.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Ilham, A. A. (2022). Analisis Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Kebijakan Pencegahannya di Kabupaten Kulonprogo. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(4), 86-102.
- Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(04), 250-262.

Hermanto, S. F. P., & Hapsari, R. D. (2024). UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI SURABAYA MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH SURABAYA DENGAN UNICEF (2021-2023). *Journal Publicuho*, 7(2), 492-503.